

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amiruddin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Boedi Harsono, 2007, *Hukum Agraria Indonesia : Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta.
- Hilman Hadikusuma, 2003, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Cetakan Kedua, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Irianto, Sulistyowati, 2005, *Perempuan Di Antara Berbagai Pilihan Hukum, Yayasan Obor Nasional*, Jakarta.
- Koentjaningrat, 1983, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta.
- Maria S.W. Sumardjono, 2008, *Tanah dalam Perspekti Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, Kompas, Jakarta.
- Marzuki, 1983, *Metodologi Riset*, PT. Hanindita Offset, Yogyakarta.
- Moh Jamin, 2014, *Peradilan Adat Pergeseran Politik Hukum, Perspektif Undang-Undang Otonomi Khusus Papua*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Moleong, Lexy J, 2006, *Metode Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Myrna A. Safitri, 2011, *Untuk Apa Pluralisme Hukum ?*, Epistema Institute, Jakarta.
- Raharjo, Satjipto, 2010, *Sosiologi Hukum : Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, Cetakan ke II, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Rato, Dominikus, *Hukum Adat (Suatu Pengantar Singkat Memahami Hukum Adat di Indonesia)*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta.
- Sudantra, I Ketut, 2016, *Pengakuan Peradilan Adat Dalam Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman*, Denpasar: Swasta Nulus bekerjasama dengan Bali Shanti Pusat Pelayanan konsultasi Adat dan Budaya Bali dan Puslit Hukum Adat (LPPM Unud).
- Soerjono Soekanto, 2003, *Hukum Adat Indonesia*, Cetakan Keenam, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Sumardjono, Maria SW, *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Tasrifin Tahara, 2014, *Melawan Strootip : Etnografi. Reproduksi Identitas, dan Dinamika Masyarakat Katobengke yang Terabaikan*, CV. Buton Cipta Nusa, Buton.

Windia, Wayan P & Sudantra, 2016, Pengantar Hukum Adat Bali, Cetakan Kedua, Swasta Nulus bekerja sama dengan “Bali Shanti” Pusat Pelayanan Konsultasi Adat dan Budaya Bali LPPM UNUD dan Puslit Hukum Adat LPPM UNUD, Denpasar.

Jurnal dan Lainnya

Ahmadi Hasan, Penyelesaian sengketa melalui upaya (non litigasi) Menurut Peraturan Perundang-undangan, Jurnal AL BANJARI Vol 15, No. 9, Januari-Juni, 2007.

Bakri, Muhammad “Pembatasan Hak Menguasai Tanah Oleh Negara dalam Hubungannya dengan Hak Ulayat dan Hak Perorangan Atas Tanah”, Disertasi Program Pascasarjana Universitas Brawijaya Malang, 2012.

Beckmann, Keebet von Benda, “*Forum Shopping and Shopping Forums: Dispute Processing in a Minangkabau Village in West Sumatra*,” *Journal Legal Pluralism*. 1981.

Doly, Denico, Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Alternative Dispute Resolution (ADR), Info Singkat Hukum Vol. VI, No. 01/I/P3DI/Januari/2014.

Haba, Salomo, “Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Melalui Peradilan Adat di Kecamatan Kupang Timu”, Tesis, Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2016.

Istijab, Penyelesaian Sengketa Tanah Sesudah Berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria, Widya Yuridika Jurnal Hukum Volume 1 / Nomor 1 / Juni 2018.

Mentary Palayukan, “Sengketa Pewarisan Tanah Tongkonan Kering di Tana Toraja (Studi Penyelesaian Sengketa Menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor 3264/PDT/90)”, Tesis, Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2018.

Raoda, Tata Krama Dalam Adat Istiadat Orang Katobengke di Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara, Patanjala Vol. 11 No.2 Juni 2019, Makassar, 2019.

Rosana, Ellya, Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat, Jurnal TAPIS Vol. 10 No. 1 Januari-Juni 2014, Fakultas Ushuluddin IAIN Raden Intan Lampung, Bandar Lampung.

Simarmata, Rikardo, Mencari Karakter Aksional dalam Pluralisme Hukum, dalam: Tim HuMa, *Pluralisme Hukum: Sebuah Pendekatan Interdisipliner*, Jakarta, Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis, 2005.

Situmorang, Mosgan, 2009, *Laporan Penelitian Hukum Tentang Penyerdehanaan Proses Peradilan*, Pusat Penelitian Dan Pengembangan Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta.

Sumarto, “*Penanganan dan Penyelesaian Konflik Pertanahan dengan Prinsip Win-Win Solution oleh Badan Pertanahan nasional RI*” Disampaikan pada Diklat Direktorat Konflik Pertanahan Kemendagri RI tanggal 19 September, 2012.

Utama dan ,Aristya, “*Kajian Tentang Relevansi Peradilan Adat Terhadap Sistem Peradilan Perdata Indonesia*”, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, 2014.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan